

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)

ANALISIS SANKSI EKONOMI OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP KUBA
PASCA-REVOLUSI HINGGA AKHIR PERANG DINGIN (1960-1991): PERSPEKTIF
CARL SCHMITT TENTANG STATE OF EXCEPTION

Nicholas Peter Sebastian Suwarto

Universitas Pelita Harapan

ARTICLE INFO

Keywords: Republic of Cuba, United States Embargo, Carl Schmitt, State of Exception

Kata Kunci: Republik Kuba, Embargo Amerika Serikat, Carl Schmitt, State of Exception

Corresponding author:

Nicholas Peter Sebastian Suwarto

01688240008@student.uph.edu

Abstract. This research is motivated by the revolution initiated when Fidel Castro led resistance against the government of President Fulgencio Batista, who had previously staged a coup against the general election in 1952. Following the revolution in Cuba, Fidel Castro, as the new head of government, transformed Cuba's system of governance to be based on the principles of communism. Observing the impact of the adoption of communism under Fidel Castro's administration, the United States decided to impose economic sanctions on Cuba. The purpose of this study is to explore how the imposition of economic sanctions on Cuba can be understood through the perspective of Carl Schmitt's "State of Exception." To address this, the author employs Carl Schmitt's concept of the "State of Exception," which explains how sovereign power possesses the authority to suspend the legal system. Thus, this power can declare a "State of Exception" if a country faces an existential threat to its integrity. A qualitative approach and descriptive method form the basis for data collection and analysis.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh revolusi yang dimulai ketika Fidel Castro memimpin perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Fulgencio Batista, yang sebelumnya melakukan kudeta terhadap pemilihan umum pada tahun 1952. Setelah terjadinya revolusi di Kuba, Fidel Castro, sebagai kepala pemerintahan yang baru, mengubah sistem pemerintahan Kuba menjadi berbasis pada prinsip komunisme. Mencermati dampak dari penerapan komunisme dalam sistem pemerintahan Fidel Castro, Amerika Serikat memutuskan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Kuba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bagaimana penerapan sanksi ekonomi terhadap Kuba dapat dipahami melalui perspektif "State of Exception" Carl Schmitt. Dalam menjawab penelitian ini, penulis menggunakan pandangan Carl Schmitt mengenai "State of Exception". State of Exception merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana kekuasaan kedaulatan sebagai otoritas yang memiliki wewenang untuk menanggulangi sistem hukum. Dengan demikian, kekuasaan ini dapat menyatakan "State of Exception" jika suatu negara menghadapi ancaman eksistensial terhadap integritasnya. Adapun pendekatan kualitatif dan metode deskriptif menjadi landasan dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

PENDAHULUAN

Republik Kuba adalah salah satu negara yang paling menarik dan bersejarah di Amerika Utara. Dikenal luas sebagai "*The Pearl of Antilles*", Kuba merupakan pulau terbesar di kepulauan Karibia dan juga salah satu negara yang paling berpengaruh di kawasan tersebut. Selain keindahan dan keunikan alamnya, Kuba juga menyimpan banyak sejarah yang kaya dan menarik. Keberadaannya yang signifikan merujuk pada salah satu momen paling bersejarah dalam sejarah Kuba, yaitu Revolusi Kuba. Revolusi ini dimulai ketika Fidel Castro memimpin perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Fulgencio Batista, yang sebelumnya melakukan kudeta terhadap pemilihan umum pada tahun 1952. Fidel Castro meluncurkan berbagai upaya perlawanan untuk menjatuhkan rezim Batista, termasuk melalui propaganda dan perang gerilya. Akhirnya, pada 1 Januari 1959, rezim Batista tumbang, dan ia melarikan diri dari Kuba. Revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro tentu memicu berbagai respons dari komunitas internasional. Namun, salah satu respons yang paling krusial datang dari Amerika Serikat. Hubungan Kuba bersama dengan Amerika Serikat bisa dikatakan cukup erat pada masa Presiden Fulgencio Batista. Hal ini dapat dilihat melalui pembantuan militer untuk melawan pemberontak Fidel Castro dan juga beberapa kerja sama perdagangan yang telah dilakukan. Namun, hubungan antara Kuba dengan Amerika Serikat mulai retak ketika Fidel Castro menjabat sebagai presiden Kuba.

Beberapa pejabat penting di Amerika Serikat, terutama yang konservatif, telah mengingatkan presiden Amerika untuk mewaspadai Castro. Hal ini disebabkan karena Castro adalah seorang yang menganut ajaran komunis. Namun, ada beberapa pejabat yang masih bersikap optimis bahwa Castro dapat berubah. Pada tahun 1959, Castro mengunjungi Amerika Serikat. Pemerintahan Amerika Serikat pada saat itu mulai mendoktrin mengenai bahayanya komunisme. Wakil Presiden Nixon menyimpulkan bahwa pemimpin Kuba tersebut sangat naif mengenai ancaman komunisme dan tampaknya tidak merasa takut jika para komunis akhirnya berkuasa di Kuba, tetapi tetap kita tidak punya pilihan selain mengarahkan dia ke arah yang benar. Komunisme dianggap sebagai ancaman terhadap perdagangan bebas, pemilu yang bebas dan juga kebebasan individu. Dalam pandangan Amerika Serikat dan sekutunya, komunisme yang dipromosikan oleh Uni Soviet berpotensi mengancam tatanan politik dan ekonomi yang telah dibangun di dunia barat yaitu didasarkan pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan juga ekonomi pasar bebas. Alasan mengapa Amerika Serikat mewaspadai komunisme di Kuba adalah karena komunisme dianggap dapat mengancam kebebasan individu serta mempengaruhi stabilitas politik di kawasan Amerika Latin. Tidak hanya itu juga, jika Kuba berhasil menjadi negara komunis, maka hal ini akan membuka peluang bagi penyebaran ideologi komunis ke negara-negara di Amerika Selatan dan Tengah.

Keretakan hubungan persahabatan antara kuba dan Amerika Serikat kemudian pecah setelah Fidel Castro memutuskan untuk mengadopsi kebijakan luar negeri baru yaitu kerja sama dagang (minyak dan gula) antara Uni Soviet dan Kuba pada tahun 1960. Sebuah perjanjian dagang ditandatangani oleh Mikoyan dan Castro, di mana perjanjian tersebut mencakup pembelian

425.000 ton gula pada tahun 1960 dan 1 juta ton gula setiap tahun selama empat tahun berikutnya. Alhasil, Uni Soviet akan membayar harga pasar dunia (tiga sen per pon), dengan tambahan sebesar 20 persen. Secara bersamaan, diumumkan kredit dari Soviet kepada Kuba sebesar \$100 juta, yang dapat digunakan untuk peralatan, mesin, material, dan bantuan teknis dari Uni Soviet. Kredit ini memiliki syarat standar bunga sebesar 2,5 persen dan dapat dilunasi dalam bentuk ekspor tradisional selama periode 12 tahun. Oleh karena itu, Kuba dan Uni Soviet kembali menjalin hubungan diplomatik di tingkat kedutaan. Tindakan ini menyebabkan hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat memburuk secara signifikan. Pada tahun 1961, ketegangan antara Amerika Serikat dan Kuba semakin meningkat. Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba pada 3 Januari 1961 sebagai respons terhadap permintaan Kuba yang meminta pengurangan jumlah staf Kedutaan Besar Amerika Serikat di Havana menjadi hanya 18 orang dalam waktu 48 jam.

Puncak pemberian sanksi yang diberikan terhadap Kuba terjadi di bawah pemerintahan Presiden John F. Kennedy. Hal ini terjadi akibat pemerintahan Kennedy yang mendanai invasi Teluk Babi yang gagal pada bulan April 1961, serta pada saat Fidel Castro secara terbuka mendeklarasikan dirinya sebagai seorang Marxis-Leninis. Akibatnya, pada Februari 1962, pemerintahan Kennedy memberlakukan embargo perdagangan secara menyeluruh terhadap Kuba, sebagai respons terhadap ekspropriasi aset-aset milik Amerika Serikat yang dilakukan oleh rezim Castro. Reaksi komunitas internasional terhadap sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Kuba selama kepemimpinan Fidel Castro sebagai presiden cukup beragam, dengan adanya perbedaan yang signifikan antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan negara-negara sosialis serta negara-negara non-berpihak. Dengan itu, sanksi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengenai sahnya langkah tersebut di mata hukum internasional.

Rumusan Masalah

Embargo ini, yang dilaksanakan tanpa mandat atau persetujuan dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menimbulkan kontroversi di lingkungan internasional mengenai apakah tindakan ini melanggar prinsip-prinsip hukum internasional atau justru bisa dibenarkan sebagai tindakan yang sah dalam situasi tertentu. Dalam hal ini, teori "*State of Exception*" dari Carl Schmitt dapat digunakan untuk menganalisis apakah kebijakan tersebut sah. Schmitt berpendapat bahwa dalam keadaan darurat atau ancaman eksistensial terhadap negara, pemerintah dapat mengambil tindakan luar biasa yang melampaui norma hukum biasa, sebuah kondisi yang bisa diartikan sebagai keadaan pengecualian. Dengan itu, penulis memusatkan perhatian apakah *State of Exception* dapat digunakan untuk menganalisis apakah kebijakan tersebut sah atau tidak. Alhasil terdapat pertanyaan penelitian yang timbul adalah

1. Bagaimana penerapan sanksi ekonomi terhadap Kuba dapat dipahami melalui perspektif state of exception Carl Schmitt?

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif mengingat bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami suatu peristiwa melalui pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif (non-numerik). Dengan itu, Data yang dikumpulkan berfokus pada data yang berupa teks, gambar, wawancara, dan juga observasi.

Metode Penelitian bertitik tolak terhadap pertanyaan bukan terhadap pernyataan. Dengan itu, pertanyaan dasar tersebut dapat menentukan tipe penelitian yang ingin digunakan. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang didasarkan kepada pertanyaan dasar yaitu "bagaimana". Metode penelitian deskriptif tidak hanya mengetahui permasalahan yang terjadi secara eksploratif, namun juga dapat membantu penulis untuk mengetahui bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Tidak hanya itu juga, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis karakteristik serta kondisi suatu fenomena dengan cara yang sistematis dan terperinci.

Dalam melakukan penelitian tentu dibutuhkan sebuah proses agar data dapat dikumpulkan dan diolah secara baik. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan data sekunder. Proses pengumpulan data sekunder merupakan sebuah proses pengumpulan data yang telah ada dan dikumpulkan oleh pihak yang sudah meneliti sebelumnya. Penulis melakukan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan serta penelusuran daring. Proses pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan situs seperti Journal Storage (JSTOR), Google Scholar, dan lain sebagainya.

Tahap terakhir dalam sebuah metode penelitian merupakan proses analisis data. Proses analisis data adalah rangkaian langkah yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk mengolah data mentah menjadi informasi sehingga dapat dimengerti oleh para pembaca. Proses analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan proses deskriptif, penulis dapat mendeskripsikan rangkaian peristiwa secara kronologis mengenai mengapa Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi terhadap kuba pasca revolusi sampai perang dingin (1960-1990) serta bagaimana pandangan Carl Schmitt mengenai State of Exception melegalisasi tindakan Amerika Serikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Ekonomi yang diberikan Amerika Serikat terhadap Kuba (1960-1990)

Pemerintah dan badan multinasional memberlakukan sanksi ekonomi dengan tujuan untuk mencoba mengubah keputusan strategis dari aktor negara maupun non-negara yang mengancam kepentingan mereka atau melanggar norma-norma internasional. Beberapa pihak berpendapat bahwa sanksi merupakan instrumen yang lebih efektif dibandingkan dengan diplomasi dalam menghadapi suatu negara. Embargo yang diterapkan terhadap Kuba, atau seperti yang disebut oleh orang Kuba, *el bloqueo* (blokade), merupakan sanksi ekonomi Amerika Serikat yang paling lama

dan paling komprehensif terhadap negara manapun di dunia. Hal ini disebabkan bahwa sanksi tersebut terdiri dari berbagai serangkaian hukum serta keputusan presidensial yang diberlakukan selama lebih dari setengah abad. Embargo yang diberikan oleh Amerika Serikat tidak hanya melibatkan pembatasan perdagangan, tetapi juga berbagai kebijakan ekstrateritorial yang mempengaruhi perusahaan internasional yang berbisnis dengan Kuba. Embargo ini juga meliputi larangan ekspor barang-barang dari Amerika Serikat ke Kuba, pembekuan aset, pembatasan perjalanan warga Amerika Serikat ke Kuba, hingga larangan investasi yang diberlakukan oleh beberapa negara di benua Amerika terhadap Kuba. Melihat kompleksitas dari embargo tersebut, Fidel Castro menyebutnya sebagai *"A Tangled Ball of Yarn"*. Embargo yang diberikan terhadap Kuba telah dilakukan oleh sembilan presiden Amerika Serikat. Setiap presiden yang menjabat menyesuaikan kebijakan embargo berdasarkan situasi politik dan ekonomi yang berkembang. Namun, penulis akan memfokuskan pembahasan pada empat presiden utama yang memiliki peran signifikan dalam perkembangan embargo ini, khususnya dari pasca-revolusi hingga berakhirnya Perang Dingin, karena periode ini menjadi titik balik yang penting dalam dinamika hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat.

Embargo dimulai pada masa pemerintahan Presiden Dwight D. Eisenhower. Retorika anti-Amerika yang disampaikan oleh Fidel Castro dan nasionalisasi properti milik Amerika Serikat meyakinkan pejabat Amerika Serikat bahwa rezim Castro tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat. Selain itu, beberapa pejabat Amerika Serikat juga khawatir bahwa Kuba bisa menjadi ancaman bagi Amerika Serikat karena hubungannya dengan negara-negara di seluruh Amerika Latin. Oleh karena itu, Wakil Presiden Richard M. Nixon dan Asisten Sekretaris Negara untuk Urusan Ekonomi, Thomas Mann, berpendapat bahwa Amerika Serikat seharusnya mengurangi kuota gula Kuba. Sebelumnya, Kuba diizinkan untuk menjual jumlah gula tertentu ke Amerika Serikat dengan harga dua sen per pon dimana harga tersebut merupakan harga di atas harga pasar dunia. Hampir 60% gula Kuba diekspor ke Amerika Serikat, yang menyumbang sekitar 20 persen dari Produk Nasional Bruto Kuba. Alhasil, dengan mengancam kuota gula Kuba berarti mengancam perang ekonomi. Namun, Amerika Serikat tetap memutuskan untuk membatalkan dan memotong kuota impor gula sebesar 700.000 ton. Amerika Serikat berharap bahwa dengan mengurangi kuota tersebut, pemerintah Castro dapat berubah. Namun, hal ini juga bisa melumpuhkan ekonomi Kuba. Sebaliknya, kebijakan ini justru dapat memperkuat sentimen nasionalis Kuba terhadap Castro, sehingga mereka akan mengalihkan penyebab kemerosotan ekonomi mereka kepada Fidel Castro. Meskipun kebijakan ini masih menjadi bahan perdebatan pada saat itu, kebijakan tersebut akhirnya terwujud ketika Kuba memutuskan untuk menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Uni Soviet mengenai pertukaran minyak dengan gula. Dengan demikian, hal ini memberikan alasan yang sempurna bagi Amerika Serikat untuk membatalkan kuota gula. Dua bulan kemudian, President Dwight D. Eisenhower memutuskan untuk menetapkan kebijakan baru yaitu untuk melarang seluruh ekspor ke kuba.

Melewati masa pemerintahan Presiden Eisenhower, Presiden John F. Kennedy memberlakukan embargo ekonomi penuh terhadap Kuba sebagai bagian dari rencana yang lebih

luas untuk menggulingkan Fidel Castro pada tanggal 3 Februari 1962. Embargo ini didasarkan pada tiga undang-undang utama: The Trading with the Enemy Act of 1917 (TWEA), The Foreign Assistance Act of 1961 (FAA) dan juga The Cuban Assets Control Regulations (CACR). The Trading with the Enemy Act of 1917 (TWEA) merupakan sebuah undang-undang penting yang pertama kali disahkan pada saat perang dunia pertama terjadi. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 6 April 1917 sebagai respon terhadap deklarasi perang Amerika Serikat dengan Jerman. Tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk memungkinkan pemerintahan Amerika Serikat untuk mengontrol dan membatasi perdagangan serta transaksi keuangan dengan negara-negara asing yang dianggap sebagai musuh selama masa perang. Dengan itu, dapat melindungi keamanan nasional dengan membatasi interaksi ekonomi yang dapat membantu lawan. Di bawah TWEA, Presiden Amerika Serikat memiliki wewenang untuk mengatur atau melarang perdagangan dengan negara atau individu yang dianggap sebagai musuh. Pelarangan ini mencakup pembekuan aset, pelarangan jenis transaksi ekonomi tertentu, dan juga penerapan langkah-langkah lain untuk mencegah aliran barang atau dana yang dapat mendukung kegiatan musuh.

The Foreign Assistance Act of 1961 merupakan sebuah undang-undang untuk mempromosikan kebijakan luar negeri, keamanan, dan kesejahteraan umum Amerika Serikat dengan membantu rakyat di seluruh dunia dalam upaya mereka menuju pembangunan ekonomi serta keamanan internal dan eksternal, dan untuk tujuan lainnya. Walaupun undang-undang ini mempromosikan kerja sama, hal ini tidak berlaku bagi negara-negara yang dicatat sebagai ancaman terhadap Amerika Serikat, terutama Kuba. FAA secara khusus juga memberikan wewenang kepada Presiden untuk menetapkan dan mempertahankan embargo total terhadap semua perdagangan antara Amerika Serikat dengan Kuba. Jadi bisa dibilang undang-undang ini menyediakan dasar hukum alternatif untuk sanksi yang telah diterapkan terhadap kuba sebelumnya. Pada tahun berikutnya, undang-undang tersebut diperbarui sehingga dapat menanggukuhkan bantuan Amerika Serikat kepada semua negara komunis (berdasarkan dari sub-bagian 602 dari FAA). Bagian ini juga memperkuat sanksi terhadap negara-negara yang melakukan ekspropriasi (pengambilalihan) properti milik Amerika Serikat. FAA semakin memperkuat sanksi terhadap negara-negara komunis dengan secara khusus menyebutkan daftar negara-negara yang termasuk di dalamnya, hal ini juga termasuk kuba. Kuba selalu diidentifikasi secara khusus sebagai negara komunis yang dikenakan sanksi berdasarkan FAA.

The Cuban Assets Control Regulation 1963 (CACR) merupakan sebuah serangkaian peraturan yang diterapkan oleh pemerintahan Amerika Serikat untuk membatasi transaksi keuangan dan property yang terkait dengan Kuba. Peraturan ini dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat sebagai bagian dari langkah-langkah yang lebih luas untuk memperkuat embargo ekonomi yang diisukan oleh Presiden John F. Kennedy. CACR melarang hampir semua transaksi finansial antara warga negara atau perusahaan Amerika Serikat dengan Kuba. Hal ini juga termasuk larangan transfer uang, pembayaran kredit, utang, dan jenis transaksi lainnya. Tidak hanya berlaku bagi warga negara Amerika Serikat, namun undang-undang ini juga berlaku bagi warga negara Kuba yang ada di Amerika Serikat. CACR melakukan pembekuan

seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah Kuba dan juga warga negara Kuba. Pembekuan aset mencakup rekening bank, investasi, dan juga properti yang dimiliki oleh warga negara Kuba di Amerika Serikat. Peraturan ini juga melarang pembelian atau impor barang-barang yang berasal dari Kuba, kecuali untuk "materi informasi" (seperti publikasi, musik yang direkam, dan karya seni tertentu). Meski sangat ketat, peraturan ini memberikan beberapa pengecualian, seperti untuk pengiriman barang-barang yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan (makanan dan obat) atau untuk transaksi tertentu yang melibatkan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan Kuba.

Setelah berakhirnya masa pemerintahan Presiden John F. Kennedy, Presiden Lyndon B. Johnson berusaha untuk menginternasionalisasikan embargo terhadap Kuba. Tujuannya adalah untuk mengisolasi Kuba secara ekonomi dan politik sebagai respons terhadap keterpaduan Fidel Castro dengan Uni Soviet. Presiden Lyndon B. Johnson menginternasionalisasikan embargo tersebut dengan bekerja sama dengan negara-negara Amerika Latin dan Eropa Barat agar mereka memutuskan hubungan ekonomi dengan pulau tersebut. Hal ini dilakukan melalui integrasi kawasan organisasi yaitu Organization of American States. Organisasi Negara-Negara Amerika adalah sebuah organisasi regional yang terdiri negara-negara di benua Amerika, yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama antarnegara di wilayah tersebut dalam berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, sosial dan juga budaya. Pada tahun 1962, atas instigasi Amerika Serikat, OAS memberlakukan sanksi wajib terhadap Kuba. Dengan ini hampir semua negara anggotanya memutuskan hubungan ekonomi dan diplomatik dengannya. Namun, hanya Meksiko yang menolak untuk mematuhi sanksi tersebut. Kuba merespons statusnya sebagai negara paria dengan meningkatkan ekspor revolusi ke negara-negara tetangganya, dengan Meksiko sebagai pengecualian yang mencolok. Langkah ini mencerminkan upaya Kuba untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Amerika Latin meskipun menghadapi isolasi internasional.

Presiden Ronald Reagan mengambil sikap lebih keras terhadap Kuba. Hal ini disebabkan oleh Kuba meningkatkan dan memberikan dukungan terhadap para revolusioner di Amerika Tengah sehingga terjadi adanya ketidakstabilan dalam kawasan. Pada tahun 1982, Kuba ditetapkan sebagai "Negara Sponsor Terorisme" oleh Amerika Serikat. Penetapan ini mengarah pada pemberlakuan sanksi tambahan, seperti adanya pembatasan bantuan luar negeri, larangan penjualan senjata, kontrol yang lebih ketat terhadap penjualan barang dengan penggunaan ganda serta adanya pembatasan finansial. Selain itu, Presiden Ronald Reagan mengeluarkan kebijakan untuk lebih mengurangi aliran mata uang keras pada tahun 1985. Pemerintahan Reagan memutuskan untuk memotong jumlah uang kiriman yang dapat dikirimkan oleh warga Kuba-Amerika kepada keluarga mereka di pulau tersebut, dari \$2.000 menjadi \$1.200. Presiden Ronald Reagan menyatakan bahwa Kuba tidak akan diperbolehkan untuk memperoleh mata uang keras dari keluarga maupun wisatawan Amerika. Hal ini disebabkan bahwa Kuba secara aktif mendukung kekerasan bersenjata terhadap teman dan sekutu Amerika Serikat. Presiden Reagan juga memperluas jangkauan ekstrateritorial embargo dengan melarang impor produk yang mengandung nikel kuba. Nikel merupakan komoditas utama Kuba pada masa itu. Dalam rangka

memperkuat embargo ini, pemerintahan Reagan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan sekutu Amerika Serikat untuk menyertifikasi bahwa ekspor mereka ke Amerika Serikat bebas dari nikel buatan Kuba. Kebijakan ini tidak hanya menargetkan perusahaan atau negara yang memiliki hubungan langsung dengan Kuba, tetapi juga mencakup perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan internasional yang melibatkan kuba

Implikasi Sanksi Ekonomi terhadap Kuba

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pada mulanya, Kuba dan Amerika Serikat merupakan mitra perdagangan. Kuba sendiri merupakan sumber penting bagi Amerika Serikat untuk gula, cerutu, dan mineral mentah. Investor Amerika Serikat secara bertahap mendiversifikasi dan memperluas kegiatan mereka di Kuba, dari sektor gula ke berbagai sektor ekonomi Kuba lainnya seperti pariwisata, ekspor dan impor, serta modal bank swasta dan resmi. Dengan adanya Integrasi ekonomi yang erat antara Kuba dan Amerika Serikat, integrasi tersebut membuat indikator ekonomi dan sosial Kuba berada di antara yang tertinggi di dunia. Sebenarnya, sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Kuba bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah ketidaknyamanan. Sanksi tersebut bukanlah sebuah ancaman karena Kuba menerima bantuan dari blok Uni Soviet antara tahun 1960 dan 1989. Bantuan dana yang diberikan oleh blok Uni Soviet terhadap kuba diperkirakan mencapai hampir \$6 miliar per tahun pada akhir 1980 an. Tidak hanya itu juga, pengurangan kuota gula oleh Amerika Serikat tidak memiliki dampak serius terhadap volume ekspor Kuba karena Kuba telah mengirimkan hampir tiga perempat dari kuota tersebut. Sebagai hasilnya, Kuba berhasil menjual kelebihan gula yang tidak dibeli oleh Amerika Serikat ke berbagai negara lain. Selain itu, Kuba menggantikan hubungan dagang dan investasi yang terputus dengan Amerika Serikat melalui kemitraan ekonomi dan politik yang erat dengan negara-negara blok Soviet dan Tiongkok. Hal ini menyebabkan ekonomi Kuba dengan cepat menjadi bergantung pada bantuan ekonomi besar-besaran dari negara-negara blok Soviet. Pada akhirnya, terdapat tiga jenis bantuan ekonomi yang diberikan oleh negara-negara blok Soviet untuk Kuba yaitu pasar ekspor yang mengutamakan ekspor utama Kuba, yaitu gula dan nikel; perjanjian pasokan dan pengiriman jangka panjang dengan harga yang ditetapkan menguntungkan bagi Kuba; serta adanya kredit perdagangan yang dapat mendukung kemampuan Kuba untuk mengimpor produk lain yang dibutuhkan.

Meskipun Kuba telah menerima bantuan dari Uni Soviet, terdapat sejumlah implikasi yang harus dihadapi akibat sanksi yang dikenakan oleh Amerika Serikat dan komunitas internasional. Dari sekian banyak implikasi yang muncul, penulis memilih delapan poin utama yang menggambarkan dampak signifikan terhadap perekonomian Kuba dan interaksinya dengan lingkungan internasional. Berikut adalah implikasi sanksi yang dikenakan oleh Amerika Serikat dan juga lingkungan internasional:

1. Sulitnya mempertahankan persediaan peralatan modal

Beberapa sumber melaporkan bahwa sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat menyulitkan Kuba untuk mempertahankan persediaan peralatan modalnya (di mana yang sebagian besar peralatan modalnya diperoleh dari Amerika Serikat). Ketidaktersediaan suku cadang dan layanan untuk peralatan tersebut menyebabkan seringnya terjadi penghentian kerja di sektor produksi akibat kekurangan bahan baku dan komponen. Selain itu, sebagian besar kendaraan transportasi dan peralatan pertanian praktis tidak dapat digunakan karena kesulitan mendapatkan aksesori dan suku cadang yang diperlukan. Akibatnya, Kuba terpaksa mengimpor peralatan yang kurang efisien dengan konsumsi bahan bakar lebih tinggi dari negara-negara blok Soviet.

2. Peningkatan Biaya Pengiriman dan Transportasi Perdagangan

Dengan adanya pemutusan hubungan dagang Kuba dengan Amerika Serikat, maka secara signifikan meningkatkan biaya pengiriman dagang. Kuba tidak lagi dapat mengimpor barang langsung dari Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Kuba harus mencari barang dari negara-negara yang seringkali berada lebih jauh (Benua Eropa dan Asia), sehingga menyebabkan biaya transportasi yang lebih tinggi. Embargo tersebut juga mencakup langkah-langkah yang memasukkan kapal-kapal yang terlibat dalam perdagangan dengan Kuba ke daftar hitam, sehingga menyulitkan perusahaan pelayaran untuk beroperasi secara efisien di pasar ini. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya, tetapi juga membatasi ketersediaan opsi pengiriman, yang semakin memperumit logistik untuk impor Kuba. Akibat dari peningkatan biaya pengiriman ini, harga komoditas penting seperti makanan, obat-obatan, dan bahan industri naik secara signifikan. Secara total, diperkirakan bahwa embargo hanya menambah sekitar 5-10% pada biaya pengiriman Kuba.

3. Kekurangan Devisa

Dari sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Kuba, Kuba memiliki keterbatasan untuk mengimpor barang dagangnya akibat kekurangan devisa. Departemen Pertanian Amerika Serikat menyatakan bahwa Kuba memiliki kekurangan devisa untuk membeli input produksi yang dibutuhkan seperti pupuk, minyak, pestisida, suku cadang, dan peralatan yang sebelumnya disediakan dengan syarat yang sangat disubsidi oleh blok Soviet. Hal tersebut merupakan masalah yang paling mendesak yang dihadapi oleh para petani di Kuba. Masalah ini juga berdampak pada kemampuan Kuba untuk membeli produk-produk dari Amerika Serikat jika sanksi ekonomi AS dicabut. Castro akan membutuhkan pinjaman dari Amerika dan lembaga keuangan lainnya. Kecuali jika pinjaman tersebut disertai dengan syarat perubahan struktural yang substansial, pinjaman ini hanya akan memperburuk sistem ekonomi yang kuno, tidak efisien, dan represif.

4. Terjadinya Moratorium Utang

Pada tahun 1986, Kuba menghadapi tantangan ekonomi yang parah yang diperburuk oleh penurunan dukungan dari Uni Soviet dan embargo Amerika Serikat yang terus berlanjut. Negara ini telah mengakumulasi utang yang signifikan, mencapai sekitar \$10,9 miliar yang terutang kepada Paris Club dan kreditor lainnya. Hal ini terpaksa membuat Kuba melakukan moratorium utang. Moratorium utang membuat Kuba menjadi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang dari bank-bank komersial. Pengecualian ini secara serius membatasi kemampuannya untuk mendapatkan pinjaman yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi dan proyek infrastruktur. Dengan pembiayaan jangka panjang yang tidak tersedia, Kuba terpaksa mengandalkan pinjaman jangka pendek dengan bunga tinggi atau perjanjian barter untuk membiayai perdagangannya. Pinjaman-pinjaman ini seringkali disertai dengan syarat yang tidak menguntungkan, yang semakin membebani ekonomi yang sudah tertekan.

5. Kesusahan dalam menerima investasi asing

Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan pengurangan bantuan kepada negara-negara sekutunya, termasuk Kuba. Situasi ini memaksa Kuba mencari sumber pendanaan alternatif untuk menopang perekonomiannya. Dengan berkurangnya dukungan dari Uni Soviet, Kuba menyadari pentingnya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu mitra dagang. Salah satu strategi yang diambil adalah menarik investasi asing. Namun, upaya ini dihadapkan pada tantangan besar, terutama karena adanya hukum yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

6. Isolasi dari lingkungan internasional

Melihat dari lingkungan internasional, Kuba sangat terdampak oleh sanksi ekonomi multilateral yang diterapkan bersama oleh negara-negara anggota Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), yang diusulkan oleh Presiden Lyndon B. Johnson. Impor Kuba dari Amerika Latin turun drastis dari \$84 juta pada tahun 1958 menjadi hanya \$2,5 juta pada tahun 1965. Perdagangan Kuba dengan Amerika Latin juga merosot tajam, dengan ekspor hanya sekitar \$1 juta dan impor yang hampir sama besarnya, yaitu sekitar \$1 juta. Selain itu, Kuba tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan dari beberapa lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (International Bank for Reconstruction and Development). Ini menjadikan Kuba tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan keuangan dari lembaga-lembaga tersebut, terlepas dari status sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

7. Sektor Pariwisata

Dalam sektor pariwisata, sektor pariwisata Kuba tetap tertekan setelah pemerintahan Castro mengambil alih kekuasaan dan embargo yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Jumlah kedatangan wisatawan dari negara-negara blok Soviet dilaporkan tidak pernah melebihi 30.000 per tahun, yang sangat kontras dengan Amerika Serikat, di mana sekitar 275.000 hingga 350.000 wisatawan mengunjungi Kuba setiap tahunnya. Untuk memperbaiki sektor pariwisata, pemerintah Kuba menetapkan kebijakan baru. Kuba mengembangkan industri pariwisata dengan menarik mitra asing. Pemerintah Kuba memberikan libur pajak selama 10 tahun kepada mitra asing dan hak untuk mengirimkan keuntungan dalam mata uang keras. Namun, pertumbuhan sektor pariwisata terbatas karena adanya embargo yang terus berlanjut serta kurangnya investasi asing yang signifikan.

8. Sektor Kesehatan

Dalam Sektor kesehatan, studi menunjukkan bahwa krisis ekonomi serta embargo yang diterapkan oleh Amerika Serikat telah berdampak di berbagai aspek dalam kesehatan masyarakat Kuba. Hal ini mencakup adanya penurunan tingkat gizi terhadap anak-anak dan lansia di kuba (yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit kronis dan gangguan imun), dan terbatasnya akses terhadap obat-obatan (yang menyebabkan terjadinya penyakit menular seperti tuberkulosis dan malaria). Embargo Amerika Serikat juga berdampak signifikan pada infrastruktur kesehatan publik Kuba, membatasi

ketersediaan peralatan diagnostik, pasokan medis, dan farmasi. Hal ini memperburuk kemampuan tenaga medis untuk memberikan perawatan yang efektif. Banyak rumah sakit dan apotek mengalami kekosongan stok obat-obatan vital, yang memaksa masyarakat bergantung pada pasar gelap atau sumbangan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pandangan Carl Schmitt Mengenai Konsep “State of Exception”

Implikasi dari sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap Kuba telah memicu berbagai tanggapan di lingkungan internasional. Sebagian negara berpendapat bahwa sanksi tersebut sah karena Kuba menganut sistem pemerintahan komunis dan mendukung aksi-aksi yang dikategorikan sebagai "*State Sponsors of Terrorism*." Namun, negara lain berargumen bahwa sanksi ini justru tidak manusiawi, karena menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Kuba. Untuk menjawab dilema ini, penulis akan menganalisisnya melalui pandangan Carl Schmitt mengenai "*State of Exception*". Carl Schmitt adalah seorang ahli hukum konservatif dan teoritikus politik asal Jerman yang dikenal karena kritiknya terhadap liberalisme dan definisinya tentang politik yang didasarkan pada perbedaan fundamental antara "kawan" dan "lawan." Ia berpendapat bahwa perbedaan ini merupakan inti dari identitas dan pengambilan keputusan politik, dengan menekankan bahwa politik secara inheren melibatkan konflik eksistensial. Schmitt juga dikenal melalui konsepnya tentang kedaulatan, yang didefinisikan sebagai kekuasaan untuk memutuskan dalam situasi "*exception*" (Pengecualian). Dengan itu, negara mempunyai kemampuan untuk melampaui norma hukum dalam momen krisis demi menjaga ketertiban.

Konsep *state of exception* memiliki sejarah yang panjang, bahkan topik ini dapat ditelusuri kembali ke Revolusi Prancis. Asal mula konsep *State of Exception* tentu dapat ditelusuri jauh ke belakang, bahkan konsep tersebut sudah ditemukan sejak zaman revolusi Prancis (pada akhir abad ke-18). Pada masa itu, negara-negara mulai mempertanyakan bagaimana hukum dan otoritas eksekutif dapat bertindak dalam kondisi tak terduga. Dalam situasi krisis politik dan militer yang ekstrim, otoritas negara merasa perlu untuk mengesampingkan terhadap hukum yang berlaku di lingkungan internasional guna melawan ancaman terhadap kedaulatannya. Selain itu, *State of Exception* juga terkadang dapat ditemukan dalam beberapa peristiwa yang terjadi dalam interaksi lingkungan internasional. Dalam konteks hubungan internasional, negara sering kali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus mengambil keputusan yang tidak biasa, terutama dalam keadaan darurat atau konflik. Dalam situasi krisis global, seperti terorisme, pandemi, atau perubahan iklim, negara-negara sering kali harus membuat keputusan yang cepat dan mungkin tidak konvensional. Kedaulatan dalam konteks ini mencakup kemampuan untuk menentukan tindakan yang diperlukan dalam keadaan darurat, meskipun itu mungkin melanggar norma-norma yang sudah ada. *State of exception* memiliki fungsi sebagai kondisi khusus di mana tatanan yuridis sebenarnya ditangguhkan akibat keadaan darurat atau krisis serius yang mengancam negara. Dalam situasi seperti ini, kekuasaan kedaulatan, yaitu kekuasaan eksekutif, mendominasi atas yang lainnya dan hukum serta norma dasar dapat dilanggar oleh negara dalam menghadapi krisis. Meskipun ide bahwa pengecualian adalah dasar hukum yang dikemukakan oleh Agamben, konsep *state of*

exception yang lebih sistematis dan teoritis baru benar-benar dikembangkan di abad-ke 20, terutama oleh Carl Schmitt.

Terdapat empat poin yang ditemukan dalam penjelasan Carl Schmitt mengenai *State of Exception*. Empat poin tersebut mencakup:

1. Kedaulatan sebagai Keputusan

Teori kedaulatan dalam hubungan internasional biasanya dipahami sebagai kemampuan suatu negara untuk mengontrol masyarakat serta wilayahnya, dan juga bagaimana negara tersebut mendapatkan pengakuan dari negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan dianggap sebagai status yang dapat diukur dan dinyatakan secara konkret. Namun, hal tersebut berbalik dengan pandangan Carl Schmitt mengenai kedaulatan. Ia berpendapat bahwa kedaulatan tidak hanya tentang kontrol teritorial ataupun kekuasaan yang dibatasi oleh hukum, tetapi kedaulatan terletak pada kemampuan untuk mendeklarasikan keadaan pengecualian ketika negara menghadapi ancaman eksistensial. Dalam pandangannya, "*Sovereign is he who decides on the exception*" menekankan sebuah kedaulatan yang mempunyai kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang mengubah atau mengabaikan norma hukum yang ada dalam situasi tertentu. Dalam kondisi normal, hukum dan konstitusi mengatur segala hal, namun dalam situasi luar biasa, kedaulatan berfungsi untuk membatalkan atau menyimpang dari hukum tersebut demi menjaga stabilitas negara.

2. Monopoli atas Keputusan

Schmitt berpendapat bahwa negara memiliki monopoli atas keputusan dalam situasi kritis, yang sering sekali disebut sebagai "state of emergency". Dalam konteks ini, negara memiliki hak eksklusif untuk menentukan kapan dan bagaimana hukum dapat dilanggar atau dibatasi. Dengan itu, tidak ada lembaga atau otoritas lain (seperti parlemen atau pengadilan) yang dapat mengganggu atau menantang terhadap keputusan tersebut. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh negara dalam "state of emergency" tidak bisa dipertanyakan atau digugat oleh pihak lain.

3. Ketidakberdayaan Hukum

Carl Schmitt mengkonseptualisasikan kekuasaan kedaulatan sebagai otoritas untuk menangguhkan sistem hukum. Schmitt menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, hukum bisa kehilangan kekuatan atau relevansinya. Ketika negara-negara yang sedang menghadapi situasi kritis dimana hal tersebut dapat mengancam keberadaannya, hukum yang berlaku di lingkungan internasional tidak dapat membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, negara-negara yang berdaulat bertindak bebas di luar hukum tersebut. Dalam keadaan seperti ini, keputusan yang dibuat tidak lagi sesuai dengan hukum melainkan bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini disebabkan oleh tindakan tersebut menegaskan kedaulatan negara.

4. Produksi Hukum

Schmitt menganggap bahwa kedaulatan juga terkait dengan kemampuan untuk "memproduksi" hukum. Dalam artian ini, hukum bukan hanya aturan yang ada diterapkan secara mekanis dalam lingkungan internasional, tetapi juga merupakan hasil dari sebuah kebijakan luar negeri yang diciptakan oleh suatu negara dalam situasi tertentu. Negara, sebagai pemegang kedaulatan dan otoritas tertinggi, mempunyai hak untuk menentukan apa yang sah dan tidak sah berdasarkan kebutuhan dan situasi yang ada (bahkan jika itu melanggar aturan hukum yang sedang ada). Tidak hanya itu juga, untuk memajukan kepentingannya atau jika negara tersebut sedang menghadapi ancaman, negara tersebut mempunyai hak untuk menciptakan hukum. Produksi hukum ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan hasil dari keputusan berdaulat yang diambil oleh pihak yang berkuasa dalam keadaan tertentu.

Secara keseluruhan, konsep *State of Exception* bagi Carl Schmitt merupakan suatu keadaan di mana negara memiliki kebebasan untuk bertindak di luar kerangka hukum dan dapat menciptakan hukum khusus dalam menghadapi ancaman yang dapat mengganggu kedaulatannya.

Analisis Sanksi Amerika menggunakan konsep “State of Exception”

Penerapan sanksi ekonomi terhadap Kuba dapat dilihat sebagai keputusan berdaulat yang dibuat oleh Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh pemerintahan Fidel Castro setelah Revolusi Kuba 1959. Amerika Serikat memutuskan untuk menanggukuhkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Kuba melalui embargo ekonomi ketika Kuba memutuskan untuk beraliansi dengan Uni Soviet. Keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat dilandaskan oleh alasan yaitu nasionalisasi properti milik Amerika Serikat di Kuba, hubungan dekat Kuba dengan Uni Soviet, dan dukungan Kuba terhadap rezim-rezim revolusioner di Amerika Selatan.. Sanksi ekonomi terhadap Kuba adalah contoh dari monopoli atas keputusan yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Hal ini didasari oleh Amerika Serikat mengabaikan respon dari PBB dan juga lingkungan internasional, sehingga Amerika Serikat mengambil keputusan untuk memberikan sanksi secara sepihak. Tidak hanya itu juga, keputusan Amerika Serikat untuk memberlakukan embargo terhadap Kuba dapat dipahami sebagai refleksi dari monopoli keputusan yang dimiliki oleh negara yang berdaulat, dimana hukum internasional atau norma lainnya tidak menghalangi negara untuk bertindak dalam kondisi darurat yang dianggap mengancam kepentingannya. Dalam hal ini, Amerika Serikat menggunakan kedaulatan politiknya untuk menanggukuhkan berbagai aturan internasional demi mempertahankan kepentingan nasional.

Penerapan sanksi ekonomi terhadap Kuba memperlihatkan adanya ketidakberdayaan hukum yang berlaku di lingkungan internasional. Amerika Serikat memutuskan untuk memberlakukan embargo dan sanksi ekonomi meskipun hal ini jelas melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional, seperti hak negara untuk menentukan pilihan ideologi politik dan sistem ekonomi mereka sendiri, serta hak untuk berdagang bebas di pasar internasional. Hukum internasional yang mengatur mengenai kebebasan perdagangan dan kedaulatan negara sudah tidak dianggap lagi oleh Amerika Serikat. Hal ini disebabkan bahwa Amerika Serikat menilai bahwa hukum yang berlaku itu tidak mempunyai efek terhadap Kuba. Tidak hanya itu juga, Amerika

Serikat juga menilai bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh kuba lebih penting dibandingkan untuk mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan internasional. Sebagai contoh, sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, terutama melalui Embargo Kuba (1960), berfungsi untuk menanggukuhkan hubungan perdagangan yang sah dengan Kuba. Negara-negara lain di dunia menganggap sanksi tersebut sebagai pelanggaran terhadap norma hukum internasional. Namun, dalam konsep *State of Exception*, Amerika Serikat memiliki hak untuk bertindak di luar hukum internasional demi melindungi eksistensinya, sehingga hukum yang biasa berlaku tidak dapat menghalangi keputusan tersebut. Amerika Serikat dalam kasus sanksi ekonomi terhadap Kuba "memproduksi hukum" untuk mengatur hubungan dengan Kuba berdasarkan kebijakan yang diambil oleh negara tersebut. Seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya, President John F. Kennedy "memproduksi hukum" baru yaitu The Trading with the Enemy Act of 1917 (TWEA), The Foreign Assistance Act of 1961 (FAA) dan juga The Cuban Assets Control Regulations (CACR). Hukum tersebut diperkirakan dapat memperkuat embargo Kuba dan menjadikannya lebih terstruktur secara hukum. Undang-undang ini menciptakan dasar hukum bagi sanksi ekonomi yang tidak hanya mengatur hubungan dengan Kuba, tetapi juga memberikan dampak pada negara-negara yang berusaha berbisnis dengan Kuba. Undang-undang ini menunjukkan bagaimana Amerika Serikat "memproduksi" hukum yang mengatur hubungan internasional dengan Kuba berdasarkan keinginan untuk menjaga stabilitas politik domestik dan geopolitik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa embargo yang diterapkan terhadap Kuba sejak tahun 1960-an oleh empat presiden Amerika Serikat disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu nasionalisasi properti milik Amerika Serikat di Kuba, hubungan dekat Kuba dengan Uni Soviet, dan dukungan Kuba terhadap rezim-rezim revolusioner di Amerika Selatan. Embargo yang telah diterapkan terhadap Kuba telah mencakup banyak hal seperti perdagangan, investasi, perjalanan, pariwisata serta memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam hubungan ekonomi dengan Kuba. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan untuk menekan ekonomi Kuba dan mempengaruhi kebijakan politik negara tersebut, namun hal ini berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan diplomatik antara kedua negara yang masih berlangsung hingga saat ini.

Melalui perspektif *state of exception* Carl Schmitt, sanksi ekonomi terhadap Kuba dapat dipahami sebagai tindakan yang sah secara berdaulat yang diambil oleh Amerika Serikat berdasarkan keputusan politik untuk menghadapi apa yang dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan nasionalnya. Dengan menggunakan kedaulatan sebagai keputusan, Amerika Serikat memutuskan bahwa hukum internasional tidak dapat menghalangi kebijakan tersebut. Negara memiliki monopoli atas keputusan dalam keadaan darurat, mengabaikan norma internasional dan produksi hukum baru untuk mengatur hubungan dengan Kuba Walaupun *state of exception* dilakukan dengan tujuan dalam situasi yang dapat mengancam kedaulatan negara, *state of exception* terkadang sering disalahgunakan dengan alasan "menjaga rakyatnya dari ancaman". Terkadang, kita dapat melihat bagaimana *state of exception* dapat digunakan untuk membenarkan

tindakan luar biasa oleh negara, sekaligus menyoroti adanya resin pelanggaran terhadap hak-hak individual.

DAFTAR PUSTAKA

- Agamben, G., & Attell, K. (2021). *State of Exception*. University of Chicago Press.
- Alas, R., Übius, U., Lorents, P., & Matsak, E. (2017). Corporate Social Responsibility In European And Asian Countries. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi (JMBI) UNSRAT* 4(1)
- Benjamin, J. R. (1989). *Interpreting the U.S. Reaction to the Cuban Revolution, 1959–1960*, 19, 145–165. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/24487082>
- Cuba's agriculture: Collapse & Economic Reform - GlobalSecurity.org. (n.d.-b). <https://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/cuba/ao255h.pdf>
- Cuba embargoed: U.S. Trade Sanctions Turn sixty*. National Security Archive. (1960, April 6). <https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/cuba/2022-02-02/cuba-embargoed-us-trade-sanctions-turn-sixty>
- Cuba: U.S. Economic Sanctions Through 1996*. RSS. (1996). <https://www.everycrsreport.com/>
- Hufbauer, G. C., Schott, J. J., Elliott, K. A., & Cosic, M. (2011, October). Case studies in economic sanctions 60-3: US v. Cuba (1960). <https://www.piie.com/sites/default/files/publications/papers/sanctions-cuba-60-3.pdf>
- Garfield, R., & Santana, S. (1997, January). *The impact of the economic crisis and the US embargo on Health in Cuba*. American journal of public health. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1380757/>
- Hand, C. (1919). Trading with the enemy act. *The Trading with the Enemy Act*, 19(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1111955>
- Hufbauer, G. C., Schott, J. J., Elliott, K. A., & Cosic, M. (2011, October). Case studies in economic sanctions 60-3: US v. Cuba (1960). <https://www.piie.com/sites/default/files/publications/papers/sanctions-cuba-60-3.pdf>
- Kempster, N. (1986, August 23). *U.S. curbs Cuban migration, trade : Tightens ban on visas as way to end Castro "trafficking in human beings."* Los Angeles Times. <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1986-08-23-mn-15772-story.html>
- Los Angeles Times. (2015, May 8). *Facts and figures about Cuba*. Los Angeles Times. <https://www.latimes.com/travel/la-tr-d-cuba-facts-20150510-story.html#:~:text=Cuba's%20nickname%20is%20Pearl%20of,shares%20with%20the%20Dominican%20Republic>
- McCormic, J. P. (2024). *Carl Schmitt*. Encyclopædia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Carl-Schmitt>
- Schmitt, C., Schwab, G., & Strong, T. B. (2021). *Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty*. University of Chicago Press.
- Tulung, J., & Ramdani, D. (2024). Political Connection and BPD Performance. *International Research Journal of Business Studies*, 16(3), 289-298. <http://dx.doi.org/10.21632/irjbs.16.3.289-298>
- Walters, R. S. (1966). Soviet economic aid to Cuba: 1959–1964. *International Affairs*, 42(1), 74–86. <https://doi.org/10.2307/2612437>

- W. Lawrence Neuman & Karen Robson (2022). Basics of Social Research: Qualitative and quantitative approaches. Pearson
- Yordanov, R. (2023). The long misunderstanding: Cuba's economic ties with the Soviet Bloc. *Journal of Cold War Studies*, 25(4), 24–52. https://doi.org/10.1162/jcws_a_01169